Media Hukum Indonesia (MHI)
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

October-2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 25-34

Analisis Komparatif Etika Deontologi Immanuel Kant Dan Utilitarianisme John Stuart Mill Dalam Menilai Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa

A Comparative Analysis of Immanuel Kant's Deontological Ethics and John Stuart Mill's Utilitarianism in Evaluating Students' Academic Dishonesty

Ardiona Rajwa Haki[1], Brian Bona Tua Situngkir[2]
[1,2]Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
email : 2310611428@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611452@mahasiswa.upnvj.co.id

Abstract: *Academic dishonesty remains a serious moral problem in higher education. This study compares Immanuel Kant's deontological ethics and John Stuart Mill's utilitarianism in assessing academic dishonesty among university students, including cheating, plagiarism, the use of ghostwriting services, and the dishonest use of artificial intelligence. Using a literature review with comparative analysis, the study examines primary works of both philosophers alongside supporting ethical literature. The findings show that both theories judge academic dishonesty as morally unjustifiable, yet on different grounds. Kant evaluates it through the motive and the impossibility of universalizing its maxim, while Mill evaluates its consequences for trust, fairness, and educational quality. The two theories are complementary: deontology emphasizes integrity and personal dignity, whereas utilitarianism clarifies social impact. Effective character education should therefore integrate both perspectives, supported by virtue ethics.*

Abstrak. Kecurangan akademik masih menjadi persoalan moral yang serius di lingkungan perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan membandingkan cara pandang etika deontologi Immanuel Kant dan utilitarianisme John Stuart Mill dalam menilai perilaku kecurangan akademik mahasiswa, yang meliputi mencontek, plagiarisme, penggunaan jasa joki tugas, dan pemanfaatan kecerdasan buatan secara tidak jujur. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan analisis komparatif terhadap karya primer kedua filsuf dan literatur etika pendukung. Hasil analisis menunjukkan bahwa keduanya sama-sama menilai kecurangan akademik sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan, tetapi dengan landasan yang berbeda. Kant menilainya dari motif dan ketidakmampuan maksim tindakan tersebut diuniversalkan, sedangkan Mill menilainya dari akibat yang merusak kepercayaan, keadilan, dan mutu pendidikan. Kedua teori bersifat saling melengkapi: deontologi menegaskan integritas dan martabat pribadi, sedangkan utilitarianisme menjelaskan dampak sosial pelanggaran. Pendidikan karakter yang efektif sebaiknya memadukan keduanya dengan dukungan etika keutamaan.

Article History
Received: 25 October 2026
Revised: 30 October 2026
Published: 05 November 2026

Keywords: *ethics, deontology, utilitarianism, academic dishonesty, integrity*

Kata Kunci: *etika, deontologi, utilitarianisme, kecurangan akademik, integritas*

https://doi.org/10.5281/zenodo.24067824

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi memiliki mandat ganda: mentransfer pengetahuan dan membentuk karakter lulusannya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa pendidikan tinggi diarahkan untuk mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan cakap.[1] Dengan kata lain, keberhasilan pendidikan tinggi tidak

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

October-2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 25-34

cukup diukur dari nilai dan kelulusan, tetapi juga dari integritas moral yang dibawa lulusan ke tengah masyarakat dan dunia kerja.

Meskipun demikian, praktik kecurangan akademik masih menjadi persoalan yang berulang di banyak perguruan tinggi. Bentuknya beragam, mulai dari mencontek saat ujian, menyalin pekerjaan teman, memalsukan data penelitian, plagiarisme, hingga memakai jasa joki untuk mengerjakan tugas atau skripsi. Perkembangan teknologi digital memperluas peluangnya. Mesin pencari, aplikasi penerjemah, dan perangkat kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) generatif memudahkan siapa pun menghasilkan teks dalam hitungan detik, sehingga batas antara memanfaatkan alat bantu secara wajar dan berbuat curang menjadi kabur bagi sebagian mahasiswa.

Persoalan tersebut pada dasarnya adalah persoalan moral, yaitu pertanyaan tentang apa yang menjadikan suatu tindakan benar atau salah. Filsafat moral menyediakan beberapa jawaban besar atas pertanyaan itu. Dua yang paling berpengaruh adalah deontologi Immanuel Kant, yang menekankan kewajiban dan motif, serta utilitarianisme John Stuart Mill, yang menekankan akibat dan kemanfaatan.[2] Kedua teori sering menghasilkan penilaian yang berbeda terhadap kasus yang sama, dan perbedaan itu bukan sekadar urusan akademis. Cara seseorang menalar benar dan salah akan memengaruhi cara ia menanggapi godaan untuk berbuat curang, cara dosen merumuskan aturan, dan cara kampus merancang pendidikan karakter.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membandingkan kedua teori etika dalam menilai kecurangan akademik mahasiswa. Pilihan konteks ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, kecurangan akademik adalah pengalaman nyata yang dekat dengan kehidupan mahasiswa sehingga teori dapat diuji pada kasus yang konkret. Kedua, kasus ini memuat unsur yang membuat kedua teori dapat bergerak berbeda, yaitu motif pelaku, dampak pada pihak lain, dan kemungkinan bahwa kecurangan tidak pernah diketahui.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Bagaimana deontologi Immanuel Kant memandang dan menilai perilaku kecurangan akademik mahasiswa? (2) Bagaimana utilitarianisme John Stuart Mill memandang dan menilai perilaku yang sama? (3) Apa persamaan dan perbedaan kedua teori dalam menilai kasus-kasus kecurangan akademik? (4) Apa implikasi hasil perbandingan tersebut bagi pendidikan karakter di perguruan tinggi?

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) dan pendekatan filosofis-komparatif. Pendekatan filosofis digunakan karena objek kajiannya adalah konsep dan argumen moral, bukan data statistik tentang perilaku. Pendekatan komparatif digunakan untuk menyandingkan dua teori secara sistematis pada kasus yang sama sehingga persamaan dan perbedaannya tampak jelas.

Sumber Data

Sumber data primer adalah karya-karya utama kedua filsuf, yaitu *Groundwork of the Metaphysics of Morals* karya Kant dan *Utilitarianism* karya Mill.[3] Sumber data sekunder meliputi buku teks etika, karya-karya kritis tentang kedua teori, serta literatur tentang kecurangan akademik dan integritas akademik. Sumber hukum berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 digunakan sebagai konteks normatif di Indonesia.[4]

[2] K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011); William K. Frankena, *Ethics*, 2nd ed. (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1973); James Rachels and Stuart Rachels, *The Elements of Moral Philosophy*, 7th ed. (New York: McGraw-Hill, 2012).

[3] Kant, *Groundwork*; Mill, *Utilitarianism*.

[4] UU No. 12 Tahun 2012; Permendiknas No. 17 Tahun 2010.

October-2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 25-34

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data dikumpulkan melalui penelusuran dan pembacaan kritis terhadap sumber-sumber tersebut. Analisis dilakukan dalam empat tahap. Tahap pertama adalah reduksi, yaitu mengidentifikasi konsep kunci masing-masing teori. Tahap kedua adalah aplikasi, yaitu menerapkan konsep tersebut pada empat kasus ilustratif kecurangan akademik. Tahap ketiga adalah komparasi, yaitu menyandingkan hasil penilaian kedua teori berdasarkan beberapa aspek pembanding, antara lain dasar penilaian, sifat aturan, dan kepekaan terhadap konteks. Tahap keempat adalah sintesis, yaitu menarik kesimpulan dan implikasi bagi pendidikan karakter. Kasus-kasus yang digunakan bersifat hipotetis sebagai ilustrasi analisis dan tidak merujuk pada peristiwa atau individu tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecurangan Akademik dalam Perspektif Deontologi Kant

Tinjauan dari sudut pandang Kant dapat dimulai dengan menguji maksim pelaku. Misalkan seorang mahasiswa bermaksim, "Saya akan menyalin jawaban teman ketika tidak siap ujian agar memperoleh nilai yang baik." Uji universalisasi menanyakan apakah maksim itu dapat dikehendaki sebagai hukum yang berlaku bagi semua orang. Jawabannya negatif. Apabila setiap mahasiswa menyalin jawaban ketika tidak siap, nilai ujian tidak lagi mencerminkan pemahaman, dan praktik menyalin itu sendiri kehilangan gunanya karena tidak ada lagi jawaban yang layak disalin. Maksim tersebut dengan demikian menggugurkan dirinya sendiri. Kant menyebut gejala ini sebagai kontradiksi dalam pengkonsepan, dan hal itu menunjukkan bahwa tindakan tersebut hanya mungkin berjalan selama sebagian besar orang lain tetap jujur. Pelaku, dengan kata lain, mengambil keuntungan dari kejujuran orang lain sambil mengecualikan dirinya dari aturan yang sama.

Rumusan kemanusiaan memperkuat kesimpulan itu. Mahasiswa yang mencontek memperlakukan dosen sebagai sarana yang dapat dikelabui agar memberikan nilai yang tidak layak, dan memperlakukan teman yang jujur sebagai sarana yang dirugikan demi keuntungan sendiri. Lebih jauh lagi, pelaku memperlakukan dirinya sendiri sebagai sarana untuk mengejar nilai, bukan sebagai makhluk rasional yang berkembang melalui belajar. Dalam rumusan Kant, manusia memiliki kewajiban terhadap dirinya sendiri untuk mengembangkan bakat dan kemampuan rasionalnya, dan kecurangan akademik jelas menghambat kewajiban tersebut.[5]

Kant juga menegaskan pentingnya motif. Seorang mahasiswa yang tidak mencontek semata-mata karena takut diawasi atau takut dikeluarkan belum bertindak secara moral dalam arti yang penuh. Ia bertindak sesuai kewajiban, tetapi belum demi kewajiban. Implikasinya penting bagi pendidikan: aturan dan sanksi saja belum cukup, karena yang hendak dicapai adalah kehendak baik yang memandang kejujuran sebagai kewajiban pada dirinya sendiri. Bagi Kant, kecurangan akademik tetap salah walaupun tidak pernah ketahuan dan walaupun tidak ada pihak yang tampak dirugikan, sebab nilai moral tindakan tidak bergantung pada konsekuensinya.

Kecurangan Akademik dalam Perspektif Utilitarianisme Mill

Dari sudut pandang Mill, penilaian dimulai dengan mengidentifikasi seluruh pihak yang terdampak dan menimbang manfaat serta kerugian yang mereka alami. Pelaku memperoleh keuntungan berupa nilai yang lebih baik atau terhindar dari kegagalan, tetapi keuntungan ini bersifat jangka pendek. Di sisi lain terdapat sejumlah kerugian. Mahasiswa yang jujur dirugikan karena usahanya tidak lagi dihargai secara adil. Dosen kehilangan alat ukur yang dapat dipercaya untuk menilai capaian belajar. Institusi kehilangan reputasi apabila praktik curang terungkap. Pada tingkat masyarakat, lulusan yang tidak kompeten dapat menimbulkan kerugian nyata, terutama pada bidang yang menyangkut

[5] Kant, *Groundwork*.

October-2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 25-34

keselamatan dan kesejahteraan orang banyak, seperti kedokteran, teknik, dan hukum. Pelaku sendiri akhirnya dirugikan karena gagal memperoleh kompetensi yang seharusnya ia miliki dan terbiasa memakai jalan pintas.

Perbedaan mutu kesenangan yang diperkenalkan Mill menambah bobot pada kesimpulan ini. Kepuasan intelektual dan moral yang lahir dari memahami materi dan meraih prestasi dengan usaha sendiri lebih tinggi nilainya daripada kelegaan sesaat karena lolos dari ujian. Menukar kesenangan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah merupakan perhitungan yang keliru. Selain itu, Mill menaruh perhatian khusus pada keadilan, yang ia pandang sebagai aturan moral yang sangat penting karena melindungi rasa aman dan kepercayaan dalam kehidupan bersama.[6] Kecurangan yang meluas merusak kepercayaan tersebut dan, pada gilirannya, merusak seluruh sistem penilaian.

Namun, penilaian utilitarian bergantung pada perhitungan akibat. Pada pendekatan utilitarianisme tindakan, kasus hipotetis yang ekstrem dapat menimbulkan pertanyaan: bagaimana bila kecurangan tidak diketahui siapa pun, tidak mengurangi nilai orang lain, dan pelakunya sangat tertekan? Di sinilah utilitarianisme aturan membantu. Aturan umum "jangan berbuat curang" terbukti secara historis menghasilkan kesejahteraan yang lebih besar daripada aturan yang mengizinkan pengecualian, karena pengecualian cenderung disalahgunakan dan menggerogoti kepercayaan.[7] Oleh karena itu, sebagian besar penafsir Mill tetap menyimpulkan bahwa kecurangan akademik salah pada hampir semua keadaan.

Penerapan pada Kasus-Kasus Ilustratif

Untuk menguji kedua teori secara lebih konkret, berikut dianalisis lima kasus ilustratif. Kasus pertama adalah mencontek saat ujian. Kasus kedua adalah plagiarisme dalam penulisan makalah. Kasus ketiga adalah penggunaan jasa joki untuk mengerjakan tugas akhir. Kasus keempat adalah penggunaan kecerdasan buatan generatif untuk menulis tugas yang dilarang memakainya. Kasus kelima adalah memberi contekan kepada teman yang sedang mengalami kesulitan. Kelima kasus ini dipilih karena mencakup situasi yang jelas, situasi yang abu-abu, dan situasi yang memuat motif baik pelaku.

Pada kasus pertama dan kedua, kedua teori sepakat. Mencontek dan plagiarisme tidak dapat diuniversalkan serta memperalat orang lain (Kant), dan merusak keadilan serta kepercayaan (Mill). Pada kasus ketiga, penggunaan joki, penilaian kedua teori juga sama, tetapi alasannya semakin kuat. Menurut Kant, joki melibatkan dua pelanggaran sekaligus: pelaku menipu institusi dan penyedia jasa turut serta dalam penipuan itu. Menurut Mill, kerugian bersifat berlapis karena kompetensi pelaku tidak terbentuk, sementara ijazah yang dimilikinya memberi sinyal palsu kepada masyarakat dan pemberi kerja.

Kasus keempat, penggunaan kecerdasan buatan, lebih kompleks. Persoalannya bukan teknologi itu sendiri, melainkan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku dan ketidakjujuran dalam mengakui hasil kerja. Apabila dosen melarang penggunaan alat tersebut atau mewajibkan pengungkapan penggunaannya, maka melanggar larangan itu sambil mengakui hasil sebagai karya sendiri adalah bentuk penipuan. Kant akan menilainya dari ketidakjujuran dan ketidakmampuan maksimnya diuniversalkan. Mill akan menilainya dari dampaknya pada pembelajaran dan keadilan. Sebaliknya, apabila penggunaan alat tersebut dibolehkan dan dinyatakan secara terbuka, tidak ada penipuan dan penilaian moralnya berubah. Kasus ini memperlihatkan bahwa kejelasan aturan dan transparansi menentukan status moral suatu tindakan.

Kasus kelima adalah yang paling menarik. Seorang mahasiswa memberi contekan kepada sahabatnya yang sedang kesulitan karena sakit atau masalah keluarga. Motifnya adalah kebaikan dan

[6] Mill, *Utilitarianism*.
[7] Singer, *Practical Ethics*.

October-2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 25-34

solidaritas. Secara deontologis, motif baik tidak membenarkan tindakan karena maksim "saya akan membantu teman dengan cara menipu penilaian" tetap tidak dapat diuniversalkan, dan kewajiban kejujuran serta keadilan terhadap seluruh peserta ujian tidak dapat dikalahkan oleh simpati pribadi. Secara utilitarian, penilaian tidak sepenuhnya sederhana pada tingkat tindakan tunggal, karena ada manfaat langsung bagi teman. Meskipun demikian, bila diperhitungkan ketidakadilan bagi peserta lain dan kebiasaan yang terbentuk, kerugian tetap lebih besar. Cara yang lebih baik secara moral adalah membantu temannya belajar atau mendampinginya mengajukan permohonan ujian susulan. Kasus ini menunjukkan bahwa pertimbangan kewajiban *prima facie* berguna:[8] kewajiban menolong teman nyata, tetapi dipenuhi lewat cara yang tidak melanggar kewajiban kejujuran dan keadilan.

Tabel 1. Penilaian kedua teori terhadap kasus-kasus ilustratif

Kasus	Penilaian umum	Alasan menurut Kant	Alasan menurut Mill
Mencontek saat ujian	Salah menurut keduanya	Maksim tidak dapat diuniversalkan; memperalat dosen dan teman	Merugikan mahasiswa jujur; merusak kepercayaan dan keadilan penilaian
Plagiarisme makalah	Salah menurut keduanya	Menipu pembaca dan menyangkal hak pencipta sebagai tujuan pada dirinya	Merusak kepercayaan ilmiah; menghambat pembelajaran pelaku
Joki tugas akhir	Salah, lebih berat	Dua pihak turut dalam penipuan; kehendak tidak berpijak pada kewajiban	Kompetensi tidak terbentuk; ijazah memberi sinyal palsu kepada masyarakat
AI dipakai melanggar aturan	Salah bila melanggar aturan atau menyembunyikan penggunaan	Ketidakjujuran dan pelanggaran janji akademik	Merugikan pembelajaran dan keadilan; boleh bila diizinkan dan dinyatakan
Memberi contekan kepada teman	Salah, meski motif baik	Motif baik tidak mengalahkan kewajiban jujur dan adil	Manfaat bagi teman lebih kecil daripada kerugian keadilan dan kebiasaan buruk

Persamaan dan Perbedaan Kedua Teori

Hasil analisis memperlihatkan bahwa kedua teori menghasilkan kesimpulan yang sama pada hampir seluruh kasus, yaitu bahwa kecurangan akademik tidak dapat dibenarkan. Persamaan ini menarik karena kedua teori berangkat dari titik tolak yang sangat berbeda. Keduanya juga sama-sama menolak pandangan bahwa moralitas bersifat relatif terhadap selera, sama-sama menuntut ketidakberpihakan, dan sama-sama memperlakukan semua orang secara setara. Kant menuntut agar maksim dapat berlaku bagi semua, dan Mill menuntut agar kebahagiaan setiap orang dihitung sama.

Perbedaan terletak pada dasar penilaian. Bagi Kant, yang menentukan moralitas adalah motif dan kesesuaian dengan kewajiban, sehingga penilaian bersifat mutlak dan tidak bergantung pada hasil. Bagi Mill, yang menentukan adalah akibat, sehingga penilaian bersifat kontekstual dan terbuka terhadap

[8] Ross, *Right and the Good*.

October-2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 25-34

pertimbangan situasi. Perbedaan ini terlihat pada kasus yang melibatkan motif baik, seperti kasus kelima, dan pada skenario yang menanyakan apakah kecurangan yang tidak diketahui siapa pun tetap salah. Perbandingan lengkap disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan deontologi Kant dan utilitarianisme Mill

Aspek	Deontologi Kant	Utilitarianisme Mill
Dasar penilaian moral	Motif atau kehendak baik dan kesesuaian dengan kewajiban	Konsekuensi: besarnya kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang
Prinsip utama	Imperatif kategoris (universalisasi dan kemanusiaan sebagai tujuan)	Prinsip kegunaan atau kebahagiaan terbesar
Sifat aturan moral	Mutlak dan tidak bergantung situasi	Fleksibel, bergantung perhitungan manfaat (atau aturan umum)
Posisi motif	Sangat penting	Kurang penting dibandingkan akibat
Kekuatan	Melindungi martabat dan hak individu; konsisten	Realistis dan peka terhadap dampak sosial
Kelemahan	Kaku pada situasi dilematis; konflik antarkewajiban	Dapat mengorbankan minoritas; kebahagiaan sulit diukur
Penilaian kecurangan akademik	Salah secara mutlak	Salah karena merusak kepercayaan, keadilan, dan mutu pendidikan
Kontribusi bagi pendidikan	Menanamkan kejujuran sebagai kewajiban intrinsik	Menjelaskan dampak sosial dan merancang kebijakan

Kritik terhadap Kedua Teori dalam Konteks Kecurangan Akademik

Deontologi Kant memberikan landasan yang kuat bagi pendidikan integritas karena tidak bergantung pada risiko ketahuan atau besarnya hukuman. Namun, pendekatan ini menghadapi tantangan ketika mahasiswa mengalami tekanan nyata, misalnya beban tugas yang berlebihan, kondisi ekonomi yang sulit, atau tuntutan beasiswa yang ketat. Etika Kant cenderung menilai tindakan, bukan keadaan yang melahirkannya, sehingga kurang membantu dalam memahami sebab-sebab struktural kecurangan. Selain itu, ketika kewajiban berbenturan, misalnya antara kejujuran dan kesetiaan pada teman, Kant tidak menyediakan prosedur penyelesaian yang jelas.[9]

Utilitarianisme sangat berguna dalam menjelaskan dampak sosial kecurangan dan merancang kebijakan kampus yang memperhitungkan seluruh pihak, tetapi bila berdiri sendiri dapat membuka celah bagi pembenaran "kecurangan kecil yang tidak merugikan siapa pun". Selain itu, kebahagiaan pelaku yang tertekan dapat dipakai untuk membenarkan pelanggaran tertentu apabila perhitungannya tidak cermat. Utilitarianisme juga dikritik karena kurang memberi tempat bagi hak individu.[10] Dalam konteks ini, hak mahasiswa yang jujur untuk dinilai secara adil tidak boleh dikorbankan demi kebahagiaan agregat yang diklaim.

Pengamatan ini sejalan dengan pandangan bahwa tidak ada satu teori pun yang sepenuhnya memadai untuk semua situasi moral.[11] Masing-masing menangkap sebagian kebenaran moral: Kant

[9] Ross, *Right and the Good*.
[10] Rawls, *Theory of Justice*; Williams, "Critique of Utilitarianism.".
[11] Frankena, *Ethics*.

October-2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 25-34

menangkap bahwa manusia memiliki martabat yang tidak boleh dikorbankan, sedangkan Mill menangkap bahwa akibat tindakan terhadap kesejahteraan orang lain tidak boleh diabaikan.

Tinjauan Etika Keutamaan sebagai Pelengkap

Etika keutamaan menawarkan sudut pandang yang tidak sepenuhnya tercakup oleh kedua teori utama. Pertanyaan pokoknya bukan apakah suatu tindakan memenuhi kewajiban atau memaksimalkan manfaat, melainkan apakah tindakan itu mencerminkan dan membentuk watak yang baik. Mahasiswa yang berulang kali mengambil jalan pintas ketika menghadapi kesulitan sedang membiasakan diri pada sikap tidak jujur dan menghindari tanggung jawab. Pembiasaan itu, menurut Aristoteles, akan mengeras menjadi watak, sehingga kecurangan pada masa kuliah dapat berlanjut menjadi kebiasaan dalam dunia kerja.[12]

Sudut pandang ini sekaligus menjelaskan mengapa pendidikan integritas tidak dapat berhenti pada pengetahuan tentang aturan. Kejujuran, keadilan, ketekunan, dan keberanian untuk mengakui kekurangan merupakan keutamaan yang perlu dilatih secara terus-menerus. Dalam kasus joki tugas akhir, misalnya, etika keutamaan akan menyoroti hilangnya keutamaan ketekunan dan kerendahan hati intelektual, sesuatu yang tidak sepenuhnya tertangkap oleh uji universalisasi Kant maupun perhitungan manfaat Mill. Dengan demikian, etika keutamaan memperkaya analisis dengan memusatkan perhatian pada proses pembentukan diri.

Sintesis: Kerangka Integratif

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini mengusulkan kerangka integratif dengan tiga lapisan. Lapisan pertama adalah lapisan kewajiban, yang berasal dari Kant: kejujuran dan keadilan diperlakukan sebagai kewajiban dasar yang tidak dapat ditawar, sehingga kecurangan tidak boleh dibenarkan hanya karena alasan situasional. Lapisan kedua adalah lapisan konsekuensi, yang berasal dari Mill: dampak kecurangan terhadap pihak lain dan terhadap lembaga dipakai untuk menjelaskan mengapa kewajiban tersebut penting dan untuk merancang kebijakan pencegahan yang proporsional. Lapisan ketiga adalah lapisan watak, yang berasal dari Aristoteles: kejujuran perlu dibiasakan sampai menjadi bagian dari karakter sehingga mahasiswa tidak lagi mengandalkan pengawasan eksternal.

Kerangka ini juga memudahkan pengambilan keputusan dalam kasus yang abu-abu. Pertanyaan yang diajukan secara berurutan adalah: apakah tindakan ini melanggar kewajiban kejujuran dan keadilan, apa dampaknya bagi semua pihak, dan orang seperti apa yang akan terbentuk apabila saya terbiasa bertindak seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijadikan alat refleksi dalam perkuliahan etika dan dalam pendampingan akademik. Ringkasan kerangka disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Kerangka integratif penilaian moral kecurangan akademik

Lapisan	Sumber teori	Pertanyaan kunci	Penerapan dalam pendidikan
Kewajiban	Deontologi Kant	Apakah tindakan ini melanggar kewajiban kejujuran dan keadilan?	Kode kehormatan, pernyataan integritas, diskusi uji universalisasi
Konsekuensi	Utilitarianisme Mill	Apa dampaknya bagi semua pihak yang terlibat?	Sosialisasi dampak, kebijakan sanksi yang proporsional

[12] Aristotle, *Nicomachean Ethics*.

October-2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 25-34

Lapisan	Sumber teori	Pertanyaan kunci	Penerapan dalam pendidikan
Watak	Etika keutamaan Aristoteles	Orang seperti apa yang terbentuk bila saya terbiasa bertindak begini?	Keteladanan dosen, pembiasaan, pendampingan akademik

Implikasi bagi Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi

Pertama, institusi perlu menanamkan kejujuran sebagai kewajiban intrinsik, bukan hanya sebagai cara menghindari sanksi. Hal ini sesuai dengan semangat deontologi Kant. Praktiknya dapat berupa kode kehormatan yang disusun bersama mahasiswa, pernyataan integritas pada setiap tugas, dan diskusi kasus etika di kelas yang mengajak mahasiswa menguji maksim tindakannya sendiri. Lickona menekankan bahwa pendidikan karakter yang efektif mencakup pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral, bukan sekadar ceramah tentang nilai.[13]

Kedua, sosialisasi tentang dampak kecurangan terhadap keadilan, mutu lulusan, dan reputasi institusi membantu mahasiswa memahami konsekuensi sosial dari perbuatannya, sesuai logika utilitarian. Informasi yang konkret, misalnya tentang risiko lulusan yang tidak kompeten pada profesi tertentu, dapat menumbuhkan empati terhadap pihak-pihak yang terdampak. Tahap perkembangan moral yang digambarkan Kohlberg juga menunjukkan bahwa pemahaman tentang akibat bagi orang lain dan tentang prinsip universal merupakan tahap lanjut yang dapat difasilitasi lewat dialog dan dilema moral.[14]

Ketiga, kampus perlu menyediakan lingkungan yang mengurangi tekanan dan godaan. Penelitian McCabe dan kolega menunjukkan bahwa aturan yang jelas dan ditegakkan secara konsisten berkaitan dengan lebih rendahnya kecurangan.[15] Bentuk asesmen yang bermakna, seperti tugas berbasis proyek, presentasi lisan, dan umpan balik bertahap, mengurangi insentif untuk menyalin. Pedoman penggunaan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, harus dinyatakan secara eksplisit agar mahasiswa memahami batas antara bantuan yang sah dan kecurangan.

Keempat, dosen berperan sebagai teladan. Keteladanan dalam menghargai sumber, memberi nilai secara adil, dan bersikap terbuka terhadap kesulitan mahasiswa lebih efektif membentuk watak daripada aturan tertulis. Hal ini sejalan dengan etika keutamaan yang memandang karakter terbentuk melalui pembiasaan dan peneladanan.[16]

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Karena berbasis studi pustaka, hasilnya belum menggambarkan bagaimana mahasiswa sesungguhnya menalar persoalan kecurangan. Selain itu, kasus yang dianalisis bersifat hipotetis dan hanya mewakili sebagian kecil ragam situasi nyata. Oleh karena itu, hasilnya perlu dibaca sebagai analisis konseptual dan bukan sebagai temuan empiris.

SIMPULAN

Deontologi Kant dan utilitarianisme Mill sama-sama menilai kecurangan akademik sebagai tindakan tidak bermoral, namun berangkat dari dasar yang berbeda. Kant menekankan motif, kewajiban, dan martabat manusia, sehingga kecurangan salah karena maksimnya tidak dapat diuniversalkan dan memperalat orang lain. Mill menekankan akibat bagi kebahagiaan bersama, sehingga kecurangan salah karena merusak keadilan, kepercayaan, dan mutu pendidikan. Perbedaan keduanya paling tampak pada

[13] Thomas Lickona, *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility* (New York: Bantam Books, 1991).
[14] Lawrence Kohlberg, *Essays on Moral Development*, vol. 1, *The Philosophy of Moral Development* (San Francisco: Harper & Row, 1981).
[15] McCabe, Treviño, and Butterfield, "Cheating in Academic Institutions."; McCabe, Butterfield, and Treviño, *Cheating in College*.
[16] Aristotle, *Nicomachean Ethics*; Hursthouse, *On Virtue Ethics*.

October-2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 25-34

kasus yang melibatkan motif baik dan pada pertanyaan tentang kecurangan yang tidak diketahui siapa pun.

Kedua pendekatan saling melengkapi. Deontologi menyediakan landasan yang tegas bagi kejujuran sebagai kewajiban, sedangkan utilitarianisme menjelaskan alasan sosial di balik kewajiban itu dan membantu merancang kebijakan. Dengan dukungan etika keutamaan, keduanya dapat dipadukan dalam kerangka integratif yang mencakup kewajiban, konsekuensi, dan watak. Pendidikan karakter yang berhasil hendaknya tidak hanya membuat mahasiswa patuh pada aturan, tetapi juga membuat mereka memahami dampak tindakannya dan memiliki integritas pribadi.

SARAN

Bagi perguruan tinggi, disarankan menyusun kebijakan integritas akademik yang jelas, termasuk pedoman penggunaan kecerdasan buatan, serta mengintegrasikan diskusi kasus etika ke dalam perkuliahan. Bagi dosen, disarankan merancang asesmen yang bermakna dan memberi teladan integritas. Bagi mahasiswa, disarankan membiasakan refleksi moral sederhana sebelum bertindak. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan menguji pemahaman dan penalaran moral mahasiswa secara empiris melalui survei atau wawancara, serta memperluas perbandingan ke tradisi etika lain, seperti etika Islam, etika Pancasila, atau etika Konfusian

REFERENSI

Aristotle. *The Nicomachean Ethics*. Translated by David Ross. Edited by Lesley Brown. Oxford: Oxford University Press, 2009.

Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Edited by J. H. Burns and H. L. A. Hart. Oxford: Oxford University Press, 1996. First published 1789.

Bertens, K. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Frankena, William K. *Ethics*. 2nd ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1973.

Hursthouse, Rosalind. *On Virtue Ethics*. Oxford: Oxford University Press, 1999.

International Center for Academic Integrity. *The Fundamental Values of Academic Integrity*. 3rd ed. 2021. https://academicintegrity.org/resources/fundamental-values.

Kant, Immanuel. *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Translated by Mary Gregor. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. First published 1785.

Kohlberg, Lawrence. *Essays on Moral Development*. Vol. 1, *The Philosophy of Moral Development*. San Francisco: Harper & Row, 1981.

Korsgaard, Christine M. *Creating the Kingdom of Ends*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

Lickona, Thomas. *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books, 1991.

Magnis-Suseno, Franz. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 1987.

McCabe, Donald L., Kenneth D. Butterfield, and Linda Klebe Treviño. *Cheating in College: Why Students Do It and What Educators Can Do About It*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2012.

McCabe, Donald L., Linda Klebe Treviño, and Kenneth D. Butterfield. "Cheating in Academic Institutions: A Decade of Research." *Ethics & Behavior* 11, no. 3 (2001): 219–32.

Mill, John Stuart. *Utilitarianism*. Edited by George Sher. 2nd ed. Indianapolis: Hackett, 2001. First published 1863.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Rachels, James, and Stuart Rachels. *The Elements of Moral Philosophy*. 7th ed. New York: McGraw-Hill, 2012.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.

Ross, W. D. *The Right and the Good*. Oxford: Oxford University Press, 1930.

Sandel, Michael J. *Justice: What's the Right Thing to Do?* New York: Farrar, Straus and Giroux, 2009.

Singer, Peter. *Practical Ethics*. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Williams, Bernard. "A Critique of Utilitarianism." In *Utilitarianism: For and Against*, by J. J. C. Smart and Bernard Williams, 77–150. Cambridge: Cambridge University Press, 1973.